

**EFEKTIFITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D)
DI TENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Di Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**

Hendra Purniawan, Novita Maulida Ikmal

Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

hendra3199@gmail.com¹, novitamaulidaikmal@uwp.ac.id²

Abstrak

Di masa pandemic Covid-19 pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT-D) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19. Salah satu bantuan sosial yang disalurkan untuk masyarakat di Desa Boteng Kecamatan Menganti adalah BLT-DD dan penerima berjumlah 133 KK. Dalam tahap penyalurannya Jumlah nominal bantuan yang disalurkan yaitu sebesar Rp. 300.000. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT-D) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19 cukup relative efektif. Adanya bantuan berupa BLT-DD masyarakat sangat merasa terbantu. Masyarakat yang mendapat bantuan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, berobat, dan sebagian digunakan untuk modal usaha.

Kata Kunci: BLT-D, Masyarakat, Covid-19

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the government provided social assistance for people affected by Covid-19. This study aims to determine the effectiveness of the distribution of direct cash assistance (BLT-D) in an effort to help the economy of the community affected by COVID-19. One of the social assistances distributed to the community in Boteng Village, Menganti District, is BLT-DD and the recipients are 133 families. In the distribution stage, the nominal amount of aid distributed is Rp. 300,000. This research uses descriptive qualitative research. The technique of collecting data and information from informants uses the methods of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study uses data analysis by Miles and Huberman. It can be concluded that the effectiveness of the direct cash assistance program (BLT-D) in an effort to help the economy of the community affected by COVID-19 is relatively effective. The existence of assistance in the form of BLT-DD, the community felt very helpful. People who receive assistance are used for daily needs, medical treatment, and some are used for business capital.

Keywords: BLT-D, Community, Covid-19

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun itu, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (R.H Unang Soenardjo dalam Hanif Nurcholis 2011:4). Dalam hal ini desa merupakan suatu hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah, dimana ekonomi di masyarakat desa sekarang ini masih belum sepenuhnya baik atau sejahtera.

Indonesia saat ini sudah tidak menjadi negara berkembang melainkan menjadi negara maju oleh karena itu pentingnya perhatian pemerintah terhadap desa ini menjadi acuan atau pendapat masyarakat tentang apakah Indonesia sudah benar-benar menjadi negara maju atau hanya sekedar tulisan saja Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Di samping pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan terus amat diperlukan guna mempercepat pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Seiring berjalannya waktu kini dunia di hadapkan dengan suatu wabah virus yang bisa mengancam kehidupan manusia tidak hanya itu juga virus ini bisa merusak perekonomian yang ada di negara-negara lain terutama di Indonesia. Virus tersebut adalah virus Covid-19 atau biasa disebut virus corona, virus ini pertama kali muncul di Wuhan China pada akhir tahun tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan sangat cepat menyebar ke negara-negara lain terutama Indonesia, Indonesia mengumumkan kasus pertama covid melalui konferensi pers presiden Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.

Seiring berjalannya waktu hingga saat ini kasus Covid di Indonesia masih terus naik dan menyebabkan kematian di usia 60 keatas atau usia rentan. Adanya Covid-19 ini mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat terpuruk, dana yang diperuntukkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di alihkan ke penanganan covid, banyak pabrik-pabrik atau lapangan kerja yang tutup akibat covid dan di tambah PHK dimana-mana sehingga seiring berjalannya waktu perekonomian di masyarakat ini juga akhirnya terpuruk, kelaparan dimana-mana dan rakyat menuntut pemerintah untuk mengatasi problem di tengah masyarakat tersebut.

Demi menjaga perekonomian Indonesia di masyarakat tetap stabil, pemerintah Indonesia mengambil langkah dan membuat kebijakan/program yakni kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat, dimana Program ini di harapkan dapat menjawab persoalan masyarakat di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat pandemi saat ini makanya diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras dan dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap rumah tangga. Namun, Dikutip Dari (detik.com) yang banyak menyebar di media sosial masih banyak rumah tangga yang masih belum mendapatkan dana bantuan tersebut. Dana yang sudah di tetapkan pada tanggal tersebut yang akan di salurkan kepada masyarakat terkendala macet di tengah akibat banyak masyarakat yang masih belum terdata pada sistem tersebut, tidak hanya itu dalam program ini juga banyak memerlukan persetujuan dari berbagai pihak termasuk bupati ataupun wali kota yang ada di daerah penyaluran dana tersebut.

Di kutip dari (DDTC.News) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat realisasi penyaluran dana desa hingga 12 April 2021 telah mencapai Rp11,36 triliun dari total anggaran Rp72 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan dana desa tersebut telah tersalurkan ke 34.053 desa. Menurutnya, pemerintah berupaya mempercepat penyaluran dana desa untuk mendorong pemulihan kegiatan ekonomi di desa. Sekitar 45% desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa. Abdul menambahkan penyaluran dana desa itu akan berlanjut kepada 40.908 desa lainnya. Dengan percepatan penyaluran, ia berharap pemerintah desa bisa segera memanfaatkannya untuk memulihkan ekonomi di tingkat desa. Dikutip dari jurnal Fernando maun (2020), anggaran dana desa yang ditetapkan sebesar Rp 72 triliun, hal ini digunakan untuk kebutuhan BLT-D, dan dialokasikan sekitar 25-35% dari total dana desa yang ada. Pelaksanaan pemberian BLT-D setidaknya dapat diterapkan selama enam bulan

dengan target penerima bantuan yaitu masyarakat terdampak Covid-19 khususnya yang sudah berumah tangga dan yang membutuhkan. Target tersebut relevan ditetapkan untuk pemberian BLT-D, mengingat sebagian besar program nasional yang terkait dengan bantuan sosial merujuk pada penerima manfaat di tingkat rumah tangga dan membutuhkan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di harapkan dapat mengatasi kemiskinan yang semakin banyak akibat dampak dari pandemi saat ini, selain itu dengan adanya kebijakan yang di buat pemerintah pusat yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yakni:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Desa Boteng yang berada dikecamatan Menganti kabupaten Gresik ini salah satu desa yang terdampak Covid-19. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19, ada yang meninggal terkena Covid ataupun yang sedang dirawat. Dari segi ekonomi banyak masyarakat juga yang kehilangan pekerjaan sehingga perekonomian mernurun. Selain itu masyarakat juga mengeluh dan meminta pemerintah menjawab keluhan mereka untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang semakin terpuruk. Hal ini di sebabkan banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kesulitan ekonomi ini di dasari karena sebagian mata pencaharian masyarakat boteng adalah petani dan buruh pabrik.

Dalam hal ini membuat pemerintah membuat alternative kebijakan guna membantu masyarakat yang terdampak atau kesulitan dalam perekonomian mereka. pemerintah pusat menyalurkan dana melalui pemerintah desa yang menganggarkan dana bantuan langsung sebesar 25-35% dari total anggaran dana desa yang akan diterima. Hal ini di dasari dari peraturan menteri keuangan No.40 tahun 2020 yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap yakni: Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 35% (empat puluh persen). Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 35% (empat puluh persen. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 30% (dua puluh persen).

Ada beberapa kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT-D adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus sudah dipastikan bahwa calon penerima bantuan sosial ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan social lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu

Prakerja. Pendataan calon penerima BLT-D, akan dipertimbangkan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari pengamatan yang saya lakukan sendiri di lapangan mengenai efektifitas dana bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin di desa Boteng yang terdampak Covid-19 peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Yang pertama yaitu apa saja kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BLT ini dan bagaimana proses pendataan penerima BLT-D di desa Boteng tersebut. Kedua, apakah desa bisa memotong dana BLT yang akan diberikan kepada masyarakat guna untuk masyarakat lain yang tidak kebagian dana BLT atau BLT yang di berikan kepada desa masih belum tercukupi, dan apakah program BLT ada terkerndala seperti ketepatan waktu.

Sejauh ini pencairan dana BLT sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Boteng Kecamatan Menganti. Namun hal ini masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang tidak tepat sasaran, adapun masyarakat yang terlihat layak untuk menerima BLT namun tidak menerima BLT tersebut, selain itu juga terdapat data penerima dana BLT yang tidak akurat, sekaligus peneliti juga melihat keterlambatan dalam penyaluran dana BLT. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) di tengah pandemic Covid-19” study ini dilakukan di desa Boteng kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effectivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Emerson Handyaningrat (1985:38) bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, Audit Commision dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Peter Drueker dalam Handoko (2001:7) mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dansasaran

akhir kebijakan (*spending wisely*). Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneterinya. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris "*programe*" yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli: pertama, Pariata Westra dkk. (1989:236) mengatakan bahwa: "Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya" Sondang P. Siagian (2006:1:17). "Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan" Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: pertama, program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. Kedua, program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran. Ketiga, program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984:181) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- e. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
- f. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

Efektivitas Program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan,1998). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

- c. Pencapaian Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantuan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.

Bantuan langsung tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brasil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Selain program BLT tak bersyarat, pemerintah juga menyelenggarakan program BLT bersyarat dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan rutin. Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia antara 0 sampai 15 tahun, atau ibu yang sedang hamil pada saat mendaftar. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar selama enam tahun. Program ini menargetkan sekitar 2,4 juta keluarga miskin, dan telah diberikan ke 20 provinsi, 86 daerah, dan 739 sub daerah dengan jumlah telah menyentuh 816.000 keluarga miskin.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti menyajikan hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya (Lexy J. Moleong, 2010: 4-11).

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Untuk memperoleh data secara lengkap maka pengambilan data dilaksanakan langsung di lokasi penelitian. Pengambilan data melalui informan-informan yang lebih mengetahui tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang akan

dilakukan, karena penelitian ini sangat memberikan kesempatan yang luas kepada peneliti untuk memfokuskan ke dalam permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dengan teknik Pendekatan wawancara dan pengumpulan data secara observasi terkait efektifitas pengelolaan dana desa sebagai dana bantuan langsung tunai (BLT) di desa Boteng kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

(Makmur 2010) Dalam hal ini Fokus penelitian adalah efektifitas Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin di desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dengan indicator yakni:

Fokus Penelitian

FOKUS	DIMENSI
Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D)	Ketepatan Waktu
	Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
	Ketepatan Sasaran

Hasil Dan Pembahasan

Sebagai salah satu dari wilayah Gresik sisi selatan, Menganti juga mempunyai deretan asal usul nama desa/dusun. Salah satunya yakni nama Desa Boteng. Desa yang telah berkembang pesat dan mempunyai deretan perumahan dan dusun ini juga mempunyai cerita tersendiri dalam lahirnya kata “Boteng”. Desa Boteng terletak di tepi sungai Lamong di selatan Desa Boboh, secara toponimis dapat ditafsirkan sebagai kediaman para pedagang, tempat memuat barang-barang berat, angkutan danau yang menunjuk pada terjadinya aktivitas perniagaan di pusat pemerintahan Giri di pedalaman.

Dari segi pengertian desa Boteng itu merupakan Singkatan dari kata Abot – Enteng, dalam arti indonesia berarti Berat – Ringan. Sebenarnya dari pemberian nama tersebut tidak ada legenda khusus yang mendasarinya. Dengan diberi Nama itu, sebagai doa agar Masyarakat Desa Boteng ini selalu memiliki Sikap Gotong royong entah hal itu berat atau ringan. Meski tak ada legenda khusus, sejatinya nama tersebut merujuk pada daerah tersebut sebagai lokasi memuat barang-barang berat, dll pada masa pemerintahan Giri. Artinya, karena adanya banyak aktivitas berat, maka Abot-Enteng (berat-ringan) musti dikerjakan secara gotong royong.

Desa Boteng juga memiliki yang Mbabat Alas alias Pembuka desa nya. Yaitu mbah Jenggot. Kenapa disebut Mbah Jenggot? Karena beliau adalah Sesepeuh tertua di Desa tersebut. Makamnya terletak di daerah desa Boteng pastinya tapi letaknya cukup jauh yakni masuk ke pelosok Desa Boteng. Makamnya cukup bagus dan terawat, jadi kalau ada yang

mau jalan jalan untuk wisata religius juga bisa mampir ke situ. Tinggal tanya tanya aja ke warga sekitar pasti semua tahu.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk transfer ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, dana desa merupakan bagian dari pendapatan asli desa dan berasal dari pendapatan transfer. Dalam rangka penanganan warga yang terdampak Covid-19 pemerintah desa menggunakan anggaran dana desa yang di gunakan untuk membantu masyarakat desa Boteng yang terdampak pandemic yang di wujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di bagikan setiap kepala keluarga (KK), dimana calon penerima BLT dana desa ini harus tidak memiliki bantuan lainnya seperti:

- a. PKH (Program Keluarga Harapan)
- b. BST (Bantuan Sosial Tunai)
- c. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
- d. JPS (Jaring Pengaman Sosial)

Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan yang sudah di sebutkan di atas tersebut dan sedang terdampak pandemic maka berhak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D). Dari alur atau tahapan di atas BLT ini sudah terealisasikan dengan benar ke masyarakat yang terdampak Covid-19 tanpa berbelit-belit, maka dari itu pemerintah sudah tepat untuk mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak yang di rasakan masyarakat yakni keterpurukan di bidang perekonomian.

Dalam Peraturan Kepala Desa Boteng (perkadades) tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah di jelaskan dan di paparkan bahwa ada instruksi untuk penyaluran Program BLT tersebut kepada masyarakat pada bulan januari. Dengan begitu masyarakat dapat merasakan dana bantuan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi baik membeli bahan pokok makanan ataupun bayar listrik.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLTD) Desa Boteng, Kabupaten Menganti Gresik, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya bantuan yang diterima keluarga terdampak pandemi setidaknya dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program yang dilakukan pemerintah ini memang sudah tepat namun tidak semua program itu pasti berjalan dengan sempurna

melainkan ada setidaknya sedikit kendala yang ada didalamnya. Untuk mengukur seberapa efektif program ini peneliti menggunakan teori Makmur (2010) dengan menggunakan dimensi ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan ketetapan dalam menentukan pilihan. Berikut ini akan di jelaskan peneliti tentang efektivitas program bantuan tersebut yakni:

1. Ketepatan waktu

Dalam dimensi ini ketepatan waktu merupakan salah satu poin penting dalam mengukur seberapa efektif program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) ini karena banyak masyarakat yang terdampak pandemic ini sangat butuh bantuan dari pemerintah terutama dalam segi perekonomian mereka namun dalam hal ini program BLT ini masih Relatif efektif dalam ketepatan waktu pasalnya di desa Boteng kecamatan Menganti Gresik ini dalam penyaluran dana BLT ini macet 4 (bulan) yakni bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

2. Ketetapan Dalam Menentukan Pilihan

Dalam dimensi ini setidaknya pemerintah desa harus mengetahui dan mengenal masyarakat dalam segi perekonomian mereka karena menentukan penerima BLT ini harus benar-benar tepat kepada mereka yang terdampak pandemic saat ini. Adapun syarat untuk mendapatkan BLT tersebut yakni:

- a. Keluarga miskin yang tidak mampu mencukupi perekonomian mereka
- b. Tidak termasuk dalam penerima program bantuan lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan bantuan pemerintah lainnya.
- c. Masyarakat yang terkena PHK dan tidak mempunyai usaha lainnya (pengangguran)

Dalam hal ini memang pemerintah desa harus benar-benar memilih masyarakat untuk menerima BLT saat ini, pemerintah desa dapat menggunakan data pokok desa untuk menjadi acuan dalam menentukan pilihan masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D).

3. Ketepatan Sasaran

Dalam dimensi ketepatan sasaran termasuk sangat penting dalam mengukur seberapa efektifkah program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) yang di buat pemerintah saat ini. Setelah pemerintah desa menentukan siapa penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) maka akan di salurkan atau dikucurkan dana untuk merealisasikan program ini. Maka dari itu dua dimensi ketetapan dalam menentukan pilihan dan ketetapan sasaran sangat

berpengaruh menjadi point penting untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic ini. Adapun golongan yang di tentukan untuk penerima BLT yakni:

- a. C1 (Cluster), adalah Masyarakat yang memiliki usaha di rumahnya ataupun di tempat lain namun masyarakat tersebut di rumahkan (PHK) akibat pandemic ini sehingga masyarakat tersebut juga terdampak.
- b. C2 (Cluster), adalah masyarakat yang tidak memiliki usaha namun masyarakat tersebut juga di rumahkan akibat PHK sehingga tidak bisa bekerja lagi, sehingga masyarakat tersebut yang dulunya belum tergolong masyarakat miskin sekarang menjadi miskin akibat pandemic ini.
- c. C3 (Cluster), adalah masyarakat yang dulunya sudah miskin dan pekerja biasa sekarang menjadi lebih miskin akibat pandemic ini makadari itu golongan C3 ini sangat membutuhkan bantuan BLT tersebut.

Adanya golongan masyarakat ini memudahkan pemerintah desa untuk memberikan dana Bantuan Langsung tunai Desa (BLT-D) kepada masyarakat. Adapun presentase penerima BLT tersebut dalam kelompok C1, C2, C3 yakni:

- a. C1, peluang mendapatkan dana BLT yakni sebesar 5%
- b. C2, Peluang mendapatkan dana BLT yakni sebesar 25%
- c. C3, Peluang mendapatkan dana BLT yakni sebesar 70%

Dengan adanya golongan yang di buat oleh pemerintah desa Boteng kecamatan Menganti tersebut dengan begittu pemerintah desa bisa mudah menentukan penerima BLT sehingga menjadi tepat sasaran. Peran pemerintah dalam mengurangi dampak pandemic saat ini adalah harapan masyarakat, masyarakat sangat mengharapkan pemerintah dalam mengurangi beban atau dampak yang dirasakan masyarakat saat ini, maka dari itu pemerinah pusat membuat program untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia yakni program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) pemerintah memberikan instruktur kepada setiap desa untuk memotong anggaran dana desa sebesar 25-35% untuk di gunakan program Bantuan Langsung Tunai. Dalam peraturan kepala desa Boteng No 2 tahun 2021 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) tertuang bahwa perintah untuk merealisasikan program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) kepada Desa Boteng Kecamatan Menganti Gresik. Dalam realisasi program tersebut terdampak beberapa kendala yang di alami desa Boteng seperti keterlambatan pencairan BLT 4 bulan yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus akibat kemungkinan data rekapan pusat masih belum selesai sehingga terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT kepada masyarakat. Di dalam ketiga dimensi

yang sudah di paparkan diatas yakni ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran semuanya sudah berjalan dengan lancar namun akan tetapi di dalam dimensi ketepatan waktu masih belum bisa di katakan maksimal karena masih terjadinya keterlambatan. Sehingga peneliti menarik kesimpulan untuk kelebihan kekurangan dalam penyaluran BLT di desa Boteng yakni:

Kelebihan:

- a. Masyarakat sangat terbantu adanya program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) di tengah pandemic ini
- b. Masyarakat miskin di desa Boteng dapat berkurang
- c. Masyarakat dapat mengelola langsung dana bantuan tersebut ingin dibuat seperti apa

Kekurangan:

- a. Program ini kurang efektif di karenakan keterlambatan penyaluran kemasyarakat oleh pemerintah pusat
- b. Program ini menimbulkan konflik social akibat masyarakat lain juga terdampak namun tidak kebagian BLT seperti contoh masyarakat C1 dan C3

Hasil Penelitian

DIMENSI	KETERANGAN
Ketepatan Waktu	Relatif Efektif
Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan	Efektif
Ketepatan Sasaran	Efektif

Dengan adanya kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat seberapa efektif program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) yang di adakan pemerintah pusat di tengah pandemic ini di desa Boteng kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

Penutup

Dari penelitian yang di lakukan peneliti tentang efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) di desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik banyak sekali menemukan hal-hal baru yang masih belum di ketahui masyarakat seperti kenapa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) masih belum di cairkan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi tentang seputar program penyaluran BLT-D.

Dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) di desa Boteng dapat dikatakan **Relatif Efektif** karena dalam penyaluran BLT-D ini sangat efektif bagi masyarakat yang benar-benar terdampak pandemic ini terutama masyarakat golongan C3 yang sebelumnya sudah miskin dan sekarang tambah miskin akibat pandemic ini. Namun, program ini masih kurang efektif jika di bagikan ke masyarakat golongan C1 dan C2 di karenakan golongan C1 ini memang juga terdampak namun bantuan yang di berikan pemerintah desa sebesar Rp.300.000 masih belum bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti bayar cicilan ataupun bayar listrik sehingga masih belum bisa efektif jika di berikan kepada golongan masyarakat C1, sedangkan masyarakat yang tergolong C2 atau masyarakat yang sebelumnya sudah bekerja dan tidak memiliki usaha sampingan di rumahnya namun mereka di rumahkan akibat pandemic sehingga masyarakat tersebut jatuh miskin bisa di kategorikan sedikit efektif, karena masyarakat tersebut umumnya memang sudah pernah bekerja dan menerima gaji yang lumayan sehingga bisa mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, namun dengan adanya PHK masyarakat tersebut menjadi miskin dan tidak mempunyai penghasilan apapun untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga pemerintah desa juga membantu masyarakat golongan C2 agar masyarakat tersebut tidak jatuh miskin akibat pandemic ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Fatoni, 2006. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Tesis (Jakarta: PT. Rineka Cipta.), 104-105.
- Abu Ahmadi, 1991 Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta.), h. 327.
- Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006. Dasar-dasar Penelitian. (Suarabaya: el Kaf), 31.
- Arikunto, S., 2007, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI hal 134, Rineka Apta, Jakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1997. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Stuktur Proses, Erlangga, Jakarta,
- Imawan, Wynandin, 2008, Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta.
- M. D. Nurfaisal, Dyah.M, Sakir. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.05, No.01, 59
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. JURNAL POLITICO, 9(2).

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moleong, Lexy J. (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Rahayu. (2017), *Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 109
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain:

(UU atau peraturan, website)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

Peraturan Kepala Desa Boteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Ravisha Indu Fawaiz, (2020), Syarat dan Cara Daftar Bantuan Dana Desa, <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-32851010/syarat-dan-cara-daftar-bantuan-bltdana-desa-rp600-ribu>, Diakses pada 13 Januari 2021.

Soraya Novika, (2020), Segudang Masalah Macet BLT Dana Desa Dari Teknis Hingga Politik, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5033554/segudang-masalah-macet-bltdana-desa-dari-teknis-hingga-politik>. Diakses pada 13 Januari 2021

Handoyo (2020), Hingga Pertengahan Oktober Penyaluran dana desa mencapai Rp. 33,2 Triliun, <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-pertengahan-oktober-penyaluran-dana-desa-mencapai-rp-332-triliun>. Diakses pada 21 Maret 2021

Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, <https://gresikkab.bps.go.id/>. Diakses Pada 7 Agustus 2021